

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR



**PEMERINTAH KOTA BEKASI**

**TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas karunia dan rahmat-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun 2023 ini dapat selesai sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi merupakan suatu pertanggungjawaban formal sebagai pengguna anggaran negara sebagaimana diamanatkan PP nomor 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi menyusun LKIP Tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi di Bidang Pekerjaan Umum selama Tahun 2023.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53/2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, pada umumnya sasaran yang direncanakan tahun 2023 dapat direalisasikan dengan baik.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dicapai oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi karena adanya komitmen seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi dalam mendukung Visi dan Misi Kota Bekasi. Disamping komitmen tersebut, peningkatan akuntabilitas dan kinerja operasional Dinas Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi juga didukung dengan motivasi yang tinggi dan kerja keras seluruh staf Dinas Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023 disusun, merupakan gambaran kinerja yang menyajikan keberhasilan maupun kekurangan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Bekasi, Januari 2024

**KEPALA DINAS BINA MARGA DAN  
SUMBER DAYA AIR  
KOTA BEKAS**



**MUHAMMAD SOLIKHIN, S.SiT, MM**  
Pembina TK.I  
NIP. 19750910 199803 1 006

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel .....	v
Daftar Gambar .....	vii
Bab I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tugas, Fungsi dan wewenang Organisasi .....	2
1.3 Sumber Daya Manusia .....	5
1.4 Aspek Strategis Organisasi.....	7
1.5 Kegiatan Dan Layanan Produk Organisasi .....	9
1.6 Sistematika Penyajian .....	8
Bab II PERENCANAAN KINERJA .....	12
2.1 Rencana Startegis .....	12
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah .....	12
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air .....	13
2.1.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	14
2.2 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	15
2.3 Rencana Anggaran Perubahan Dinas BMSDA Kota Bekasi 2023 .....	17
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA .....	19
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	19
3.2 Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama .....	21
3.2.1 Sasaran Strategis Meningkatnya Kesesuaian Dokumen Perencanaan Dengan Penganggaran dan Pelaksanaanya .....	21
3.2.2 Sasaran Strategis Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Yang Layak Untuk Menunjang Masyarakat.....	23
3.2.3.Sasaran Strategis Meningkatnya Ketersediaan Saluran dan Bangunan Air Yang Layak Untuk Menunjang Masyarakat .....	28
3.2.4 Sasaran Strategis Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas Penunjang Infrastruktur (Pedestrian, taman, penerangan jalan umum dan reklame.....	35
3.2.5 Sasaran Strategis Meningkatnya Infrastruktur Ruang Terbuka Hijau Yang Berkualitas .....	45
3.3 Realisasi Anggaran .....	47
3.4 Analisis Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis .....	50

3.5 Prestasi Organisasi .....	50
Bab IV PENUTUP .....	52

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai PerJenis Pendidikan Tahun 2022.....	5
Tabel 1.2 PNS DBMSDA Berdasarkan Golongan Ruang .....	5
Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air.....	6
Tabel 1.4 Identifikasi Permasalahan yang ada pada Dinas BMSDA .....	8
Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Bekasi 2018-2023.....	13
Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air .....	14
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama .....	15
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja DBMSDA Tahun 2023 (Esellon II) .....	16
Tabel 2.5 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis .....	18
Tabel 3.1 Evaluasi Kinerja Tahun 2023 .....	20
Tabel 3.2 Perbandingan Nilai AKIP Dinas BMSDA Tahun 2018 - 2023 .....	21
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Indikator program tahun 2023.....	22
Table 3.4 Perbandingan Jalan Dalam Kondisi Baik di Dinas BMSDA.....	23
Table 3.5 Perbandingan Kemantapan Jalan Tingkat Nasional , Provinsi, dan Kota Bekasi.....	24
Tabel 3.6 Efisiensi Anggaran Berdasarkan Pencapaian Indikator Sasaran .....	25
Tabel 3.7 Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik .....	25
Tabel 3.8 Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Target Akhir Renstra 2018-2023 .....	25
Tabel 3.9 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Presentase Jembatan Dalam Kondisi Baik.....	26
Tabel 3.10 Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase Dalam Kondisi Baik Target Akhir Renstra 2018 – 2023.....	26
Tabel 3.11 Efisiensi Anggaran Berdasarkan Pencapaian Indikator Sasaran.....	27

Tabel 3.12 Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Sasaran Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik .....	28
Tabel 3.13 Analisis Pencapaian Kinerja Indikator Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik di Dinas BMSDA.....	29
Tabel 3.14 Data Realisasi Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase .....	29
Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik.....	30
Tabel 3.16 Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik .....	32
Tabel 3.17 Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik Target Akhir Renstra 2018-2023.....	32
Tabel 3.18 Efisiensi Anggaran Berdasarkan Pencapaian Indikator sasaran.....	33
Tabel 3.19 Analisis Pencapaian Kinerja Indikator Persentase Polder Dalam Kondisi Baik di Dinas BMSDA .....	33
Tabel 3.20 Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Persentase Polder Dalam Kondisi Baik.....	34
Tabel 3.21 Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase Polder Dalam Kondisi Baik Target Akhir Renstra Tahun 2018-2023.....	35
Tabel 3.22 Capaian Kinerja Indikator Persentase Pedestrian Dalam Kondisi Baik...36	
Tabel 3.23 Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Persentase Polder Dalam Kondisi Baik.....	36
Tabel 3.24 Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik Target Akhir Renstra 2018-2023.....	37
Tabel 3.25 Analisis Pencapaian Kinerja Indikator Persentase PJU Dalam Kondisi Baik di Dinas BMSDA .....	38
Tabel 3.26 Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2018- 2023 untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase PJU Dalam Kondisi Baik.....	38
Tabel 3.27 Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase PJU Dalam Kondisi Baik Target Akhir Renstra	

Tahun 2018-2023.....	39
Tabel 3.28 Efisiensi Anggaran Berdasarkan Pencapaian Indikator sasaran.....	40
Tabel 3.29 Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Persentase PJU Dalam Kondisi Baik.....	40
Tabel 3.30 Analisis Pencapaian Kinerja Indikator Persentase Reklame Dalam Kondisi Baik di Dinas BMSDA.....	41
Tabel 3.31 Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2018- 2023 untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase PJU Dalam Kondisi Baik.....	41
Tabel 3.32 Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase Reklame Dalam Kondisi Baik Target Akhir Renstra Tahun 2018-2023.....	42
Tabel 3.33 Efisiensi Anggaran Berdasarkan Pencapaian Indikator sasaran.....	43
Tabel 3.34 Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Persentase Reklame Dalam Kondisi Baik.....	43
Tabel 3.35 Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase Reklame Dalam Kondisi Baik Target Akhir Renstra Tahun 2018-2023.....	44
Tabel 3.36 Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama Persentase Reklame Dalam Kondisi Baik.....	44
Tabel 3.37 Analisis Pencapaian Kinerja Indikator Persentase Taman Dalam Kondisi Baik di Dinas BMSDA.....	45
Tabel 3.38 Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase Taman Dalam Kondisi Baik Target Akhir Renstra Tahun 2018-2023.....	46
Tabel 3.39 Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik.....	47
Tabel 3.40 Efisiensi Anggaran Berdasarkan Pencapaian Indikator sasaran.....	47
Tabel 3.41 Anggaran Belanja Pada Dinas BMSDA Tahun 2023.....	48
Tabel 3.42 Realisasi Anggaran DBMSDA Tahun 2023.....	49
Tabel 3.43 Analisis Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2023.....	50
Tabel 3.44 Penghargaan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air.....	51



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi .....	4
Gambar 2.1 Perkin Awal Dan Perkin Perubahan .....	6
Gambar 3.1 Tim URC Pematusan .....	30
Gambar 3.2 Tim Alat Berat .....	31
Gambar 3.3 Tim URC SDA.....	31
Gambar 3.4 Tim URC PJU .....	39
Gambar 3.5 Tim URC Trisula .....	42

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dalam rangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintah yang berorientasi pada hasil, (*result oriented government*). Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2023 dalam rangka melaksanakan visi dan misi Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2018-2023 sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air.

Dasar hukum penyusunan LKIP Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.
4. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

## 1.2 TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air. Dinas BMSDA dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas BMSDA Kota Bekasi akan senantiasa menghadapi tantangan yang sangat kompleks dalam penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi. Adapun peran layanan penyediaan infrastruktur yang dilaksanakan oleh DBMSDA Kota Bekasi meliputi:

- a. Menyediakan infrastruktur jalan kota yang mantap, aman, efisien, nyaman dan terjangkau;
- b. Meningkatkan pengembangan kinerja sumber daya air Kota Bekasi;
- c. Meningkatkan pelayanan ketersediaan lampu penerangan jalan umum;
- d. Pengelolaan dan pemeliharaan taman;
- e. Perizinan dan penertiban reklame.

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terjadi perubahan tentang pembagian urusan pemerintah. Salah satu perubahan krusial dari Undang-undang tersebut adalah tentang pembagian urusan pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Perubahan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas berdampak pada perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang harus mengikuti pembagian urusan pemerintah pusat dan daerah sebagaimana tercantum pada lampiran Undang-undang 23 Tahun 2014 tersebut. Dampak dari hal tersebut salah satunya ialah terjadi perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi No 13 Tahun 2022 tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi bahwa Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, drainase, jalan, dan jasa konstruksi.

Sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 122 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi.



## Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

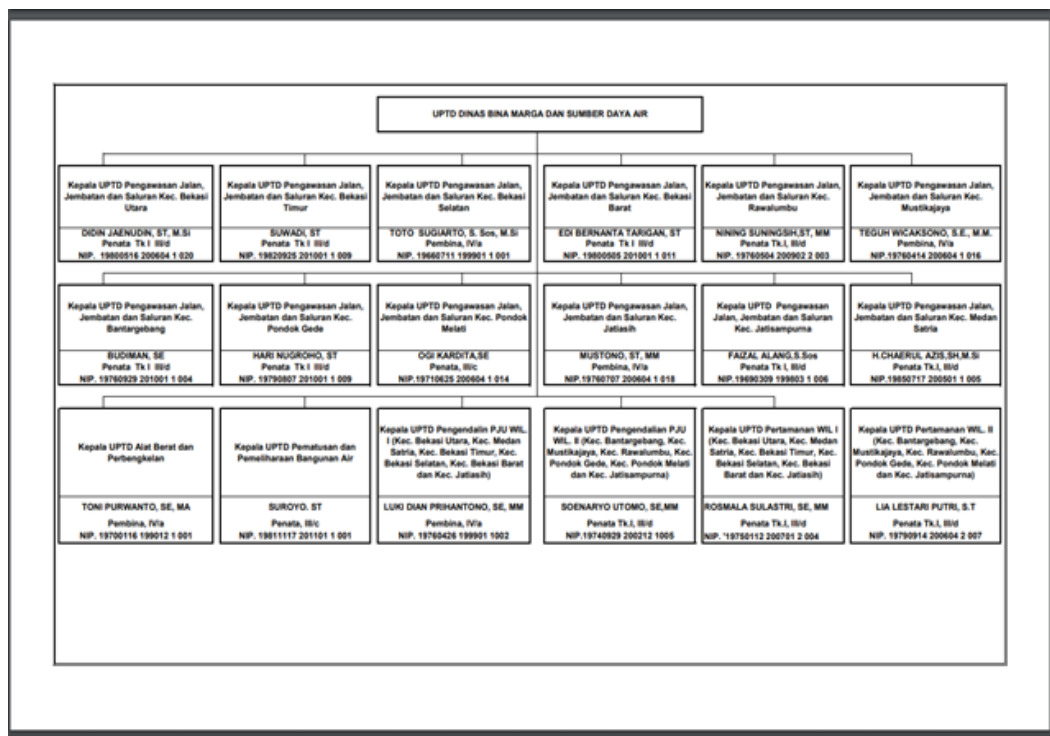
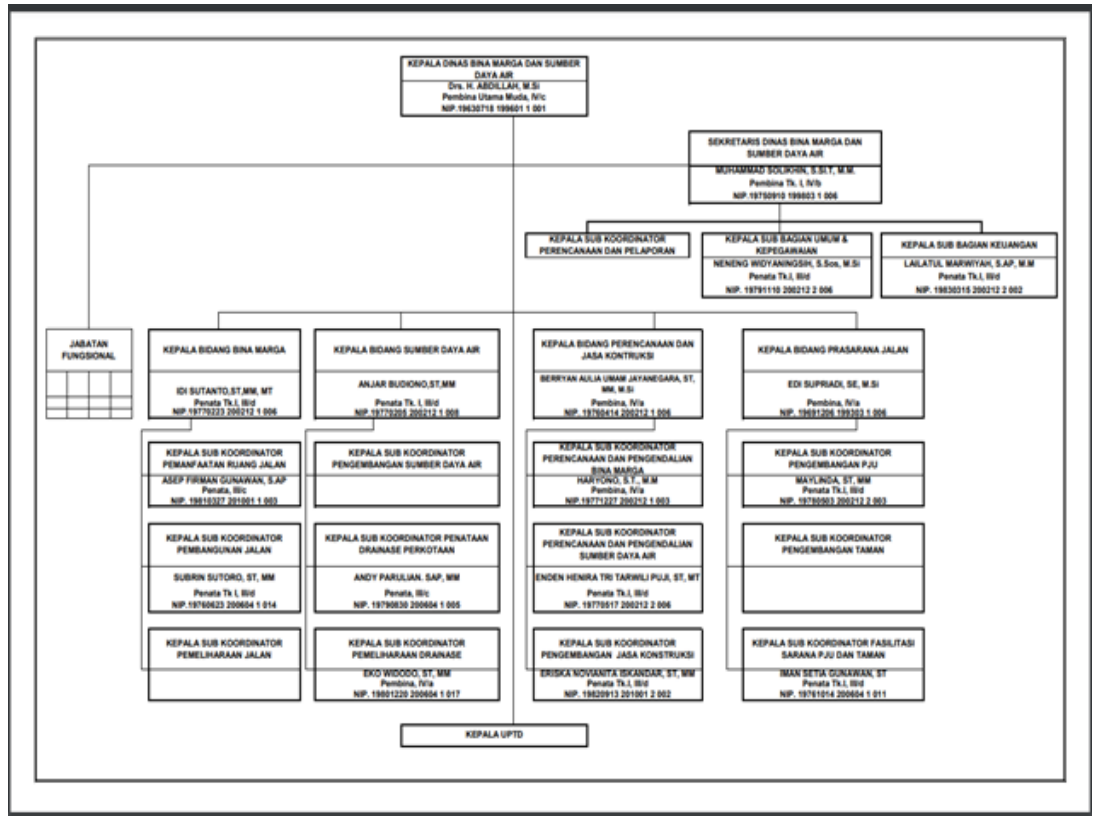
Memiliki tugas untuk membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Jasa Konstruksi serta Bidang Prasarana Jalan meliputi pengembangan penerangan jalan umum dan taman.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas, Kepala Dinas BMSDA melaksanakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, drainase, jalan dan jasa konstruksi;
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Pembinaan administrasi perkantoran;
- e. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air serta pelaksanaan hubungan kerjasama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
- f. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
- g. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- h. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Struktur organisasi pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, sebagai berikut :

Gambar 1.1  
Struktur Organisasi DBMSDA



### 1.3 SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi saat ini memiliki aparat/ personil dengan jumlah pegawai pada tahun 2023 sebanyak 338 pegawai dengan rincian 135 pegawai negeri sipil dan 193 TKK. Keseluruhan Sumber Daya Manusia memiliki potensi dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Struktur tingkat pendidikan SDM Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi tercantum pada diagram berikut :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pegawai per Jenis Pendidikan Tahun 2023 (orang)**

URAIAN	JUMLAH
S2	28
S1	66
D4	1
D 3	1
SLTA	34
SLTP	4
SD	1
<b>Jumlah</b>	<b>135</b>

*Sumber : Sub Bagian Kepegawaian DBMSDA Kota*

Gambar di atas menunjukkan bahwa sebagian besar Sumber Daya Aparatur di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi berpendidikan Strata 1/ sarjana. Berikut ini jumlah aparatur yang terdapat pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi berdasarkan golongan ruang.

**Tabel 1.2**  
**PNS DBMSDA Berdasarkan Golongan Per Desember 2023**

URAIAN	JUMLAH	PROSENTASE
Golongan IV	14 pegawai	10,37
Golongan III	84 pegawai	62.22
Golongan II	37 pegawai	27,41
Golongan I	0 pegawai	0
<b>Jumlah</b>	<b>135 pegawai</b>	<b>100</b>

*Sumber : Sub Bagian Kepegawaian DBMSDA Kota*

Selain sumber daya aparatur, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi juga didukung sarana dan prasarana perkantoran yang memadai. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi dalam penyelenggaraan pelayanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.3**  
**Sarana dan Prasarana Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi**

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak	Rusak Berat
1	Tanah dan Bangunan	2,275 m2	√		
2	Gedung	1	√		
3	Listrik	28	√		
4	Telpon	1	√		
5	Area Parkir	1	√		
6	Ruang Rapat	1	√		
7	Ruang Arsip	2	√		
8	Kendaraan Roda 4	64	59		5
9	Kendaraan Roda 2	63	58		5
10	Kendaraan Roda 6	34	√		
11	Kendaraan Roda 3	8	√		
12	Meja Rapat	11	7	4	
13	Ac	67	49	18	
14	Komputer Pc	50	45	5	
15	Komputer Notebook	26	22		4
16	Printer	91	60	31	
17	Meja Kerja	354	√		
18	Kursi Kerja	354	√		
19	Pompa Banjir	123	√		
20	Pintu Air	102	√		

21	Screen Proyektor	5	√		
22	Proyektor/ infocus	5	√		
23	Scanner	10	√		
24	Drone	2	√		
25	Mesin Penghancur kertas	3	√		
26	Sound System	5	√		
27	Meteran dorong	37	√		
28	Thermometer aspal	1	√		
29	Lemari Besi	20	√		
30	Lemari Arsip pintu kaca	10	√		
31	Rak besi Arsip	16	√		
32	Lemar Kerja	6	√		
33	Sofa	4	√		
35	Stamper	5	√		
35	Tandem Roller	3	√		
36	Camera Video	3	√		
37	Drill machine	9	√		
38	Alat Pemeriksa Beton	1	√		
39	Concret Hammer Set	2	√		
40	Excavator	8	√		

Kondisi asset pada tabel diats Sebagian besar dalam keadaan baik, namun dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi masih memerlukan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja sehingga pelayanan di Dinas bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu.

#### **1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

Setelah mengkaji dan membandingkan antara RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi



Jawa Barat Tahun 2018 – 2023, dan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 serta situasi dan kondisi yang ada terhadap tupoksi, maka dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi. Dalam perumusan isu strategis Kota Bekasi tahun 2018 - 2023 dilakukan pendekatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mana menggunakan Pendekatan Teknokratis. Pendekatan Teknokratis dilakukan melalui analisis proyeksi perkembangan Kota Bekasi berdasarkan kondisi dan permasalahan pada bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air yang ada saat ini untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Untuk itu, indentifikasi permasalahan yang ada pada DBMSDA Kota Bekasi yang harus ditangani dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan PD berdasarkan pemetaan permasalahannya dapat dilihat pada tabel 1.3 dibawah ini.

**Tabel 1.4**  
**Identifikasi Permasalahan yang ada pada Dinas BMSDA**

No. (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
1.	Terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan PD	Kinerja PD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kurang memuaskan	Belum meratanya tingkat kompetensi sumber daya manusia untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan PD
2.	Belum adanya system drainase perkotaan yang terintegrasi	Seringnya terjadi banjir dan genangan pada saat curah hujan cukup tinggi	Belum adanya master plan sistem drainase kota
3.	Kondisi jumlah kendaraan yang tidak seimbang dengan kapasitas jalan yang tersedia.	Kemacetan tidak dapat dihindari	Kurang tersedianya Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan untuk menunjang kapasitas kendaraan yang terus bertambah
4.	Belum optimalnya sistem pematusan kota sehingga masih ada wilayah yang mengalami genangan;	Terjadinya sedimentasi dan banjir	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan
5.	Adanya perubahan peruntukan lahan yang semula kawasan resapan dan konservasi menjadi kawasan terbangun.	Berakibat terjadinya banjir	Kurangnya kesadaran masyarakat dan belum adanya payung hukum
6.	Anggaran yang tidak seimbang dengan kebutuhan	Program kegiatan tidak berjalan dengan optimal	Belum terlaksananya beberapa program kegiatan yang sudah direncanakan
7.	Jaminan Kepastian Hukum Atas resiko kerja	Terjadinya kecelakaan	Tidak adanya jaminan untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
8.	Sarana dan Prasarana	Pekerjaan tidak terlaksana secara optimal	Kurangnya fasilitas yang memadai dan layak guna

Sumber : Renstra Dinas BMSDA Tahun 2018-2023

Permasalahan yang akan di tangani melalui Renstra ditahun mendatang berdasarkan evaluasi dan analisis saat ini yaitu sebagai berikut:

a. Sekretariat

1. Kondisi sumber daya manusia bidang ilmu teknis kurang memadai Pelaksanaan tugas fungsional sebagai PPK, PPTK, PELTEK dan Pembantu PELTEK kurang efisien dan efektif.
2. Lemahnya pembinaan/ bantuan hukum dalam perkara kegiatan dan administrasi dokumen – dokumen.
3. Standar operasional prosedur dalam pelayanan publik belum maksimal diterapkan.
4. Kurang fasilitas untuk menunjang kerja karyawan. Dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan PD terdapat faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja PD antara lain:
  - Sarana dan prasarana pelayanan PD yang kurang memadai
  - Kurangnya staf ahli sehingga pelayanan menjadi lambat
  - Terkendala sistem koordinasi birokrasi lintas sektor yang tidak mudah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan untuk membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Perencanaan dan Jasa Konstruksi dan Bidang Prasarana Jalan.

## **1.5 KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 122 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, maka program dan kegiatan Dinas BMSDA diarahkan untuk melaksanakan urusan pemeritah bidang pekerjaan umum, yang dapat dikelompokkan menjadi :

a. Layanan Penerangan Jalan Umum

Produk layanan yang diberikan antara lain surat permohonan perbaikan jalan umum

b. Layanan Pemanfaatan Ruang Milik Jalan

Produk layanan yang diberikan antara lain Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Rauang milik Jalan.

- c. Layanan peil Banjir
- d. Produk layanan yang diberikan antara lain advis teknis peil banjir

## **1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Sistematika penyajian LKIP Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun 2022 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Bab ini menyajikan capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

B. Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV

PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 RENCANA STRATEGIS**

Perencanaan yang baik berdampak pada keberhasilan kinerja Perangkat Daerah, oleh karenanya perlu adanya perencanaan strategis yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Perencanaan Strategis merupakan sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan

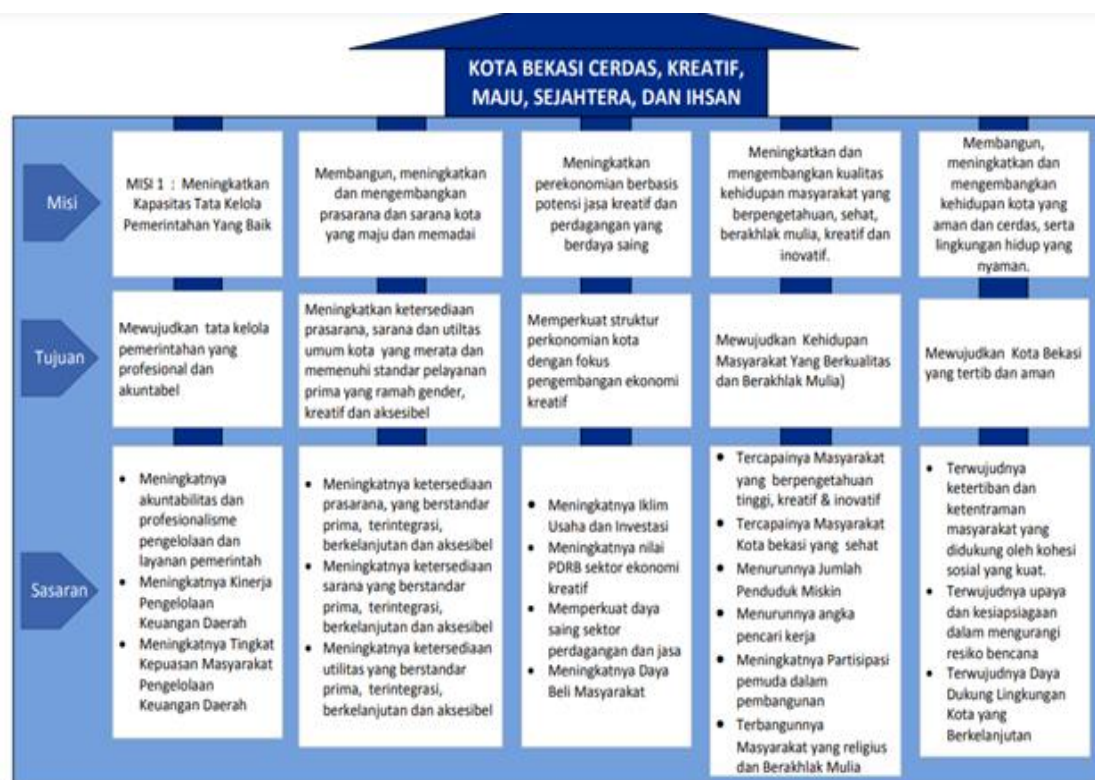
Rencana Strategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai acuan apa yang akan dicapai pada 5 tahun mendatang dan bagaimana cara mencapainya setiap tahunnya serta target-target apa yang ingin diwujudkan setiap tahapan satu tahunnya untuk mencapai tujuan 5 tahunan. Oleh Karena itu perencanaan tahunan atau Rencana Kerja (Renja) tahunan merupakan turunan dari tahapan renstra per tahun. Maka penyusunan Rencana Kerja Tahunan tidak boleh lepas dari Renstra yang telah disusun sebelumnya.

Dokumen Renstra Dinas BMSDA Kota Bekasi Tahun 2018- 2023 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah, yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS).

##### **2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah**

Visi Misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alur cascade RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Bekasi 2018-2023**



Sumber : RPJMD Perubahan Kota Bekasi 2018-2023

Berdasarkan tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah, serta tugas pokok dan fungsinya, Dinas BMSDA Kota Bekasi mendukung pada pencapaian Misi ke 1,2 dan 5 .

### 2.1.2 Tujuan Dan Sasaran Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Perumusan tujuan dan sasaran yang terukur akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai kinerja yang diharapkan dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Merealisasikan sebuah tujuan jangka menengah diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang diemban organisasi. Untuk keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran diperlukan strategi untuk mencapainya. Strategi dimaknai sebagai aktualisasi berbagai kebijakan untuk mencapai sasaran yang spesifik dan berkesinambungan. Selanjutnya, kebijakan diimplementasikan ke dalam program-program untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun.

Tujuan dan Sasaran Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, dapat dilihat pada table dibawah ini.

**Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET SASARAN				
				2019	2020	2021	2022	2023
Mewujudkan akuntabilitas pelayanan publik pada Dinas BMSDA	Nilai akuntabilitas kinerja DBMSDA	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Nilai akuntabilitas kinerja DBMSDA	NA	NA	A	A	A
Meningkatkan Fungsi Jalan	Kemantapan Jalan	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur jalan, jembatan, saluran dan bangunan air yang layak untuk menunjang Masyarakat	1. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	NA	NA	2,35%	2,35%	2,35%
			2. Persentase jembatan dalam kondisi baik	NA	NA	0,06%	0,76%	0,06%
Meningkatkan Sistem Drainase untuk mengurangi resiko banjir	Ketinggian titik banjir	Meningkatnya ketersediaan saluran dan bangunan air yang layak untuk menunjang masyarakat	1. Persentase drainase dalam kondisi baik	NA	NA	0,32%	0,32%	0,32%
			2. Persentase Polder dalam kondisi baik	NA	NA	1,82%	2,24%	2,24%
Meningkatkan ketersediaan fasilitas penunjang	Kemantapan fasilitas penunjang	Meningkatnya ketersediaan fasilitas penunjang infrastruktur (Pedestrian, taman, penerangan jalan umum, dan reklame)	1. Persentase Pedestrian dalam kondisi baik	NA	NA	1,34%	1,67%	1,67%
			2. Persentase PJU dalam kondisi baik	NA	NA	1,61%	1,61%	1,61%
			3. Persentase Reklame dalam kondisi baik	NA	NA	25, %	25,00%	25,00%
Membangun, Meningkatkan dan Mengembangkan Lingkungan Hidup yang Nyaman di Kota Bekasi	Persentase Taman dalam Kondisi Baik	Meningkatnya infrastruktur ruang terbuka hijau yang berkualitas	1. Persentase Taman dalam kondisi baik	NA	NA	8,34%	9,96%	11,78%

### 2.1.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis

instansi pemerintah, Indikator Kinerja Utama Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air di tetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama**

Sasaran	Indikator	Penjelasan/ Rumus	Satuan	Target			
				2019	2020	2021	2022
1. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel	Nilai akuntabilitas kinerja DBMSDA	Nilai AKIP Dinas BMSDA dari Laporan Hasil Evaluasi SAKIP		-	-	A	A
2. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan yang layak untuk menunjang masyarakat	1. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	Jumlah Persentase Capaian Pembangunan Jalan Baru, Pemeliharaan Jalan Arteri + Kolektor dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan	%	NA	NA	2,35%	2,35%
	2. Persentase jembatan dalam kondisi baik	Jumlah Persentase Capaian Pembangunan Jembatan Baru dan Pemeliharaan Jembatan	%	NA	NA	0,06%	0,76%
3. Meningkatnya ketersediaan saluran dan bangunan air yang layak untuk menunjang masyarakat	1. Persentase drainase dalam kondisi baik	Jumlah Persentase Capaian Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase	%	NA	NA	0,32%	0,32 %
	2. Persentase Polder dalam kondisi baik	Jumlah Persentase Capaian Pembangunan dan Pemeliharaan Polder	%	NA	NA	1,82%	2,24%
4. Meningkatnya ketersediaan fasilitas penunjang infrastruktur (Pedestrian, taman, penerangan jalan umum, dan reklame)	1. Persentase Pedestrian dalam kondisi baik	Jumlah Persentase Capaian Pembangunan Pedestrian yang ramah bagi pejalan kaki, penyandang difabel dan lansia dan Pemeliharaan Pedestrian	%	NA	NA	1,34%	1,67%
	2. Persentase PJU dalam kondisi baik	Jumlah Persentase Capaian Pembangunan PJU Baru dan Jumlah Pemeliharaan PJU	%	NA	NA	1,61%	1,61%
	3. Persentase reklame dalam kondisi baik	Jumlah Persentase Capaian Penataan dan Pemeliharaan Reklame	%	NA	NA	25,00%	25%
4. Meningkatnya Infrastruktur Ruang Terbuka Hijau Yang Berkualitas	1. Persentase Taman dalam kondisi baik	Jumlah Persentase Capaian Pembangunan Taman Baru dan Pemeliharaan Taman	%	NA	NA	8,34%	9,96%

Sumber : Renstra Perubahan DBMSDA Tahun 2018-2023

## 2.2 PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah). Tujuan perjanjian kinerja yaitu mendorong komitmen penerima amanah dalam melaksanakan amanah yang diterimanya dan diharapkan terus meningkatkan kinerjanya. Perjanjian kinerja juga berfungsi menciptakan tolok ukur kinerja yakni sebagai alat untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan serta sasaran organisasi.

Perjanjian kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- a. Terjadinya pergantian atau mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran;



c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran

Dinas BMSDA Kota Bekasi Menyusun perjanjian kinerja perubahan karena terjadinya pergantian pejabat dan perubahan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, Renja, IKU dan DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Kota Bekasi sebagai Berikut :



Gambar 2.1 Perkin awal dan Perkin Perubahan

Pada bulan September terjadi pergantian kepala dinas dikarenakan kepala dinas sebelumnya memasuki masa purna bakti. Kepala dinas yang baru dilantik berdasarkan Sk Wali Kota Nomor 821.2/ Kep.98-BKPSDM/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023.

**Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja DBMSDA Tahun 2023 ( Esellon II)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel.	1. Nilai akuntabilitas kinerja DBMSDA			Triwulan I	
					Triwulan II	
					Triwulan III	A
					Triwulan IV	
2	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan yang layak untuk	1. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	%	2.35	Triwulan I	0
					Triwulan II	0,78
					Triwulan III	0,78
					Triwulan IV	0,79

	menunjang masyarakat	2. Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	0,06	Triwulan I	0
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0,06
					Triwulan IV	0
3	Meningkatnya ketersediaan saluran dan bangunan air yang layak untuk menunjang masyarakat	1. Persentase drainase dalam kondisi baik	%	0,32	Triwulan I	
					Triwulan II	0,2
					Triwulan III	0,15
					Triwulan IV	0,15
		2. Persentase Polder dalam kondisi baik	%	2,24	Triwulan I	
					Triwulan II	
					Triwulan III	0,12
					Triwulan IV	0,12
4	Meningkatnya ketersediaan fasilitas penunjang infrastruktur (pedestrian, taman, penerangan jalan umum dan reklame)	1. Persentase Pedestrian dalam kondisi baik	%	1,67	Triwulan I	
					Triwulan II	
					Triwulan III	0,67
					Triwulan IV	1
		2. Persentase PJU dalam kondisi baik	%	1,61	Triwulan I	
					Triwulan II	0,5
					Triwulan III	0,5
					Triwulan IV	0,61
		3. Persentase Reklame dalam kondisi baik	%	25	Triwulan I	
					Triwulan II	8
					Triwulan III	8
					Triwulan IV	9
5	Meningkatnya infrastruktur ruang terbuka hijau yang berkualitas	1. Persentase Taman dalam kondisi baik	%	11,78	Triwulan I	1,28
					Triwulan II	3,5
					Triwulan III	3,5
					Triwulan IV	3,5

Sumber : Perkin Esselon 2 DBMSDA Tahun 2023

### 2.3 Rencana Anggaran Perubahan Dinas BMSDA Kota Bekasi Tahun 2023

Dinas BMSDA Kota Bekasi melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 561.601.324.080,- , dalam dinamika pelaksanaan program dan kegiatan terdapat perubahan kebijakan dari instansi vertical dan kebijakan kepala daerah, sehingga diperlukan penyesuaian penganggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, melalui mekanisme APBD Perubahan (APBD-P) tahun 2023, anggaran Dinas BMSDA Kota Bekasi mengalami perubahan menjadi Rp.825.050.433.591

## 2.5 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

No	Sasaran	Anggaran Perubahan	%	Keterangan
1	Mewujudkan akuntabilitas pelayanan publik pada Dinas BMSDA	Rp. 35.864.296.115	4,35	Sebesar 4,35 % dibandingkan dengan total belanja DBMSDA Tahun 2023
2	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan yang layak untuk menunjang masyarakat	Rp. 344.477.875.452	41,75	Sebesar 41,75% dibandingkan dengan belanja DBMSDA 2023
3	Meningkatnya ketersediaan saluran dan bangunan air yang layak untuk menunjang masyarakat	Rp.307.322.569.274	37,25	Sebesar 37,25% dibandingkan dengan belanja DBMSDA 2023
4	Meningkatnya ketersediaan fasilitas penunjang infrastruktur (pedestrian, taman, penerangan jalan umum dan reklame	Rp.110.871.292.870	13,44	Sebesar 13,44% dibandingkan dengan belanja DBMSDA 2023
5	Meningkatnya infrastruktur ruang terbuka hijau yang berkualitas	Rp.26.399.880.000	3,21	Sebesar 3,21% dibandingkan dengan belanja DBMSDA 2023

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kota Bekasi.

#### **3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Kinerja Pemerintah Kota Bekasi diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi Indikator sasaran. Media pengukuran kinerja adalah Lampiran Pengukuran Kinerja (PK).

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran diberlakukan penggunaan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

-  $\geq 100\%$  = Target Tercapai

-  $< 100\%$  = Target Tidak Tercapai

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

#### 1. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes).

#### 2. Indikator Sasaran

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Pengumpulan data kinerja Dinas BMSDA dilakukan melalui rekapitulasi dan analisis data pendukung yang berasal dari Sekretariat, Bidang, Subbag, UPTD dan Seksi

Sasaran yang ditetapkan TAPKIN 2023 ada 5 (lima) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator sasaran, yang terinci sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Evaluasi Kinerja Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja DBMSDA		A	BB (79,92)	
2	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan yang layak untuk menunjang masyarakat	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	Persen	2,35	7,46	317,4
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	Persen	0,06	0,13	216
3	Meningkatnya ketersediaan saluran dan	Persentase drainase dalam kondisi baik	Persen	0,32	0,55	171

	bangunan air yang layak untuk menunjang masyarakat	Persentase Polder dalam kondisi baik	Persen	2,24	0,04	16,66
4	Meningkatnya ketersediaan fasilitas penunjang infrastruktur (Pedestrian, taman, penerangan jalan umum, dan reklame)	Persentase Pedestrian dalam kondisi baik	Persen	1,67	0,196	11,73
		Persentase PJU dalam kondisi baik	Persen	1,61	1,93	119,8
		Persentase reklame dalam kondisi baik	Persen	25	25	100
5	Meningkatnya Infrastruktur Ruang Terbuka Hijau Yang Berkualitas	Persentase Taman dalam kondisi baik	Persen	11,76	13,75	116,72

Sumber :Laporan LKIP 2022.

### 3.2 ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

#### 3.2.1 Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kesesuaian Dokumen Perencanaan dengan Penganggaran dan Pelaksanaannya.

##### 1. Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja DBMSDA

Dilihat dari existing Tahun 2018 Nilai AKIP Dinas BMSDA mengalami kenaikan yang cukup besar dari 70,48 menjai 79,92 pada akhir tahun 2023. Perbandingan Nilai AKIP Dinas BMSDA tahun 2018-2023 dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Nilai AKIP Dinas BMSDA Kota Bekasi Tahun 2018-2023**

Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja Sasaran Pada tahun					
	Existing	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai AKIP	70,48		77,12	77,12	79,93	79,92

Sumber : Sekretariat Dinas BMSDA Kota Bekasi Tahun 2023

Pencapaian ini didukung oleh beberapa faktor antara lain :

1. Komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan Pengembangan infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas dan lansia di Kota Bekasi
2. Etos kerja aparatur Dinas BMSDA yang semakin meningkat.

**Table 3.3**

**Capaian Kinerja Indikator program tahun 2023**

No	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja	satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
<b>1</b>	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100
		Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100
		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100

### 3.2.2 Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan yang layak untuk menunjang masyarakat.

Sasaran ini diukur melalui 2 (dua) indikator Kinerja Sasaran yaitu (1) Presentase Panjang jalan dalam kondisi baik, (2) Presentase jembatan dalam kondisi baik.

#### 1. Indikator Persentase Panjang Jalan dalam kondisi baik

Jalan dalam kondisi baik yang menjadi target dalam indikator Persentase Panjang Jalan dalam kondisi baik di Kota Bekasi sebesar 2,35 persen. Adapun capaian kinerja indikator Persentase Panjang Jalan dalam kondisi baik dapat dilihat pada tabel berikut :

$$\frac{\text{Rumus Perhitungan : Presentase Jumlah dari Capaian indikator kinerja Jalan dalam Kondisi Baik}}{\text{Kondisi Ideal indikator kinerja Jalan dalam Kondisi Baik}} \times \text{Koefisien Sasaran}$$

Presentase Pembangunan Jalan Baru	=	6,95 km	X	7,07%	=	0,15 %
		340,61 km				
Persentase Pemeliharaan Jalan Arteri + Kolektor	=	114,48 km	X	6,52%	=	2,38%
		313,81 km				
Persentase Pemeliharaan Jalan Lingkungan	=	187,12 km	X	86,41%	=	4,92%
		4161,29 km				
<b>Presentase Jalan dalam kondisi baik</b>						<b>7,46%</b>

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Jalan dalam kondisi baik di Dinas BMSDA**

Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun (%)						Realisasi Kinerja Pada tahun (%)				
	Existing	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Jalan dalam kondisi baik	84,5	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	1,76	1,08	2,86	9,67	7,46

Sumber : Bidang Bina Marga Kota Bekasi Tahun 2023

Jalan dalam kondisi baik tahun 2023 dapat dibandingkan dengan capaian ditingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota:



**Tabel 3.5**  
**Perbandingan kemantapan Jalan Tingkat Nasional, Provinsi dan Kota Bekasi**

Indikator	Tingkat		
	Nasional	Jawa Barat	Kota Bekasi
<b>Kemantapan Jalan</b>	82,79	97,48	97,39

Tabel diatas menunjukkan bahwa kemantapan jalan Kota Bekasi masih dibawah Provinsi Jawa Barat sebesar 97,48% namun dibandingkan dengan Kemantapan Jalan Nasional Kota Bekasi lebih tinggi yaitu sebesar 97,39%

Berikut dalah factor yang mendukung pencapaian indikator sebagai berikut :

1. Komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan pengembangan infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas dan lansia kota Bekasi melalui 45 program prioritas Wali Kota Bekasi Tahun 2018-2023.
2. Penyediaan sumber daya infrastruktur melalui pemenuhan anggaran infrastruktur dengan sumber dana APBD
3. Adanya UPTD 12 wilayah yang membagi beban kerja dimasing-masing wilayah.
4. Adanya Tim URC Sitambel yang merupakan 45 program prioritas Wali Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yaitu Pengembangan sistem layanan cepat tanggap penanganan sampah, jalan, saluran, PJU, dan kemacetan berbasis IT
5. Etos kerja aparatur Dinas BMSDA yang semakin meningkat
6. Pada Tahun 2023 Kegiatan lebih banyak pada Pemeliharaan Jalan lingkungan yang mana target 100 km Per tahun realisasi sebesar 237,12 km.

Dari table berikut dilihat bahwa dari 95,45 % capaian realisasi anggaran, capaian indikator sasaran Persentase Jalan dalam kondisi baik yang dihasilkan sebesar 317,4 % sehingga terdapat efisiensi sumber daya (anggaran) sebesar 221 %

**Tabel 3.6**  
**Efisiensi Anggaran Berdasarkan Pencapaian Indikator sasaran**

No	Indikator sasaran/ kebutuhan Anggaran / Efisiensi	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Jalan dalam kondisi baik	2,35	7,46	317,4%
	Anggaran yang Dibutuhkan	344.477.875.452	328.789.296.448	95,45
<b>Nilai Efisiensi</b>				<b>221</b>

Program yang menunjang dalam pencapaian indikator Persentase Jalan dalam kondisi baik adalah program pengembangan permukiman. Adapun capaian kinerja indikator program sebagai berikut :

**Tabel 3.7**  
**Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik**

No	Program/ Kegiatan	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023
1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan Jalan Baru	%	96,54	95,63	104,04
		Persentase Pemeliharaan Jalan Arteri + Kolektor	%	98,54	131,69	115,37
		Persentase Pemeliharaan Jalan Lingkungan	%	73,32	83,24	113,53

Sumber : Data Bidang Bina Marga, 2023

**Tabel 3.8**  
**Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik Target Akhir Renstra 2018-2023**

	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD Tahun 0	Persentase Jalan dalam kondisi baik					Kondisi Kinerja Terakhir Pada Akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
Target	84,5	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	96,2 %
Realisasi		1,76	1,08	2,86	9,67	7,46	99 %

Sumber : Data Olahan Sub Substansi Perencanaan DBMSDA, 2023

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa indikator Persentase jalan dalam kondisi baik pada kahir periode RPJMD sudah melebihi target sebesar 99 %

## 2. Indikator Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik

Adapun capaian kinerja indikator Persentase Jembatan dalam kondisi baik dapat dilihat pada tabel berikut :

Rumus Perhitungan :

$$\frac{\text{Capaian indikator kinerja Jembatan dalam Kondisi Baik}}{\text{Kondisi Ideal indikator kinerja Jembatan dalam Kondisi Baik}} \times \text{Koefisien Sasaran}$$

Kondisi Ideal indikator kinerja Jembatan dalam Kondisi Baik

Persentase Pembangunan Jembatan Baru	=	0,042 km	X	13,803%	=	0,058%
		9,890 km				
Persentase Pemeliharaan Jembatan	=	0,048 km	X	6,19%	=	0,067%
		4,44 km				
<b>Presentase Jembatan dalam kondisi baik</b>						<b>0,13%</b>

**Tabel 3.9**  
**Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Jembatan dalam kondisi baik**

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian
Persentase Jembatan dalam kondisi baik	%	0,06	0,13	216

Dengan melihat tabel diatas bahwa target tahun 2023 sebesar 0,06 persen, sementara realisasi mencapai 0,13 persen maka capaian kinerja tahun 2023 atas indikator Presentase Jembatan Dalam Kondisi Baik sebesar 216 persen dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 terlampaui. Untuk melihat perbandingan capaian Indikator Kinerja Tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.10**  
**Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase jembatan Dalam Kondisi Baik Target Akhir Renstra 2018-2023**

Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD Tahun 0	Persentase Jembatan dalam kondisi baik					Kondisi Kinerja Terakhir Pada Akhir Periode RPJMD
	2019	2020	2021	2022	2023	

Target	67,4	4	4	0,06	0,76	0,06	68,8
Realisasi		30,67	1,1	0,17	1,047	0,13	69,22

Sumber : Data Olahan Sub Substansi Perencanaan DBMSDA, 2023

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa indikator Persentase jembatan dalam kondisi baik pada akhir periode RPJMD sudah melebihi target sebesar 69,22 %

Berikut adalah factor yang mendukung pencapaian indikator sebagai berikut :

1. Komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan pengembangan infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas dan lansia kota Bekasi melalui 45 program prioritas Wali Kota Bekasi Tahun 2018-2023.
2. Penyediaan sumber daya infrastruktur melalui pemenuhan anggaran infrastruktur dengan sumber dana APBD
3. Adanya UPTD 12 wilayah yang membagi beban kerja dimasing-masing wilayah.
4. Adanya Tim URC Sitambel yang merupakan 45 program prioritas Wali Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yaitu Pengembangan sistem layanan cepat tanggap penanganan sampah, jalan, saluran, PJU, dan kemacetan berbasis IT
5. Etos kerja aparatur Dinas BMSDA yang semakin meningkat.

Dari table berikut dilihat bahwa dari 93,79 % capaian realisasi anggaran, capaian indikator sasaran Persentase Jalan dalam kondisi baik yang dihasilkan sebesar 216 % sehingga terdapat efisiensi sumber daya (anggaran) sebesar 122 %

**Tabel 3.11**  
**Efisiensi Anggaran Berdasarkan Pencapaian Indikator sasaran**

No	Indikator sasaran/ kebutuhan Anggaran / Efisiensi	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Jembatan alam kondisi baik	0,06	0,13	216
	Anggaran yang Dibutuhkan	3.157.204.680	2.961.225.155	93,79
<b>Nilai Efisiensi</b>				<b>122,21</b>

Program yang menunjang dalam pencapaian indikator Persentase Jalan dalam kondisi baik adalah program pengembangan permukiman. Adapun capaian kinerja indikator program sebagai berikut :

**Tabel 3.12**  
**Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik**

No	Program/ Kegiatan	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023
1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan Jembatan Baru	%	53,24	58,42	109,73
		Persentase Pemeliharaan Jalan Arteri + Kolektor Jembatan	%	93,38	96,08	102,89

Sumber : Data Bidang Bina Marga, 2023

### 3.2.3 Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya ketersediaan saluran dan bangunan air yang layak untuk menunjang masyarakat

#### 1. Indikator Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014, Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan adalah upaya merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik drainase perkotaan. Sedangkan Penyelenggara Sistem Drainase Perkotaan adalah pemerintah, badan usaha, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi ditunjuk sebagai dinas yang menyelenggarakan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, dan hal ini tertuang pada Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi. Untuk itu, diperlukan perencanaan yang baik agar Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dapat terlaksana dengan baik. Berikut adalah tabel Capaian Kinerja Indikator Persentase Drainase dalam Kondisi Baik.

Rumus Perhitungan :

Capaian indikator kinerja Drainase dalam Kondisi Baik  


---

 X Koefisien Sasaran

Kondisi Ideal indikator kinerja Drainase dalam Kondisi Baik

Persentase Pembangunan drainase jalan	=	25.3 km	X	62,50%	=	0,17%
		9093,16km				
Persentase Pemeliharaan drainase	=	56.08 km	X	37,50%	=	038 %
		5455,896 km				
<b>Presentase Drainase dalam kondisi baik</b>						<b>0,55 %</b>

**Tabel 3.13**  
**Analisis Pencapaian Kinerja Indikator Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik di Dinas BMSDA**

Indikator Kinerja Sasaran	2023		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Drainase dalam kondisi baik	0,32 %	0,55 %	171 %

Sumber : Data Bidang Sumber daya Air, 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi tahun 2023 yaitu 0,55 % dengan persentase capaian 171 % dari target yang di tentukan. Dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Bidang Sumber Daya Air tahun 2023 telah melampaui target capaian kinerja yang direncanakan.

Untuk melihat perbandingan capaian Indikator Kinerja Tahun 2019 - 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.14**  
**Data Realisasi Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase**

NO	Tahun	Realisasi Pembangunan Drainase	Realisasi pemeliharaan drainase
1	2019	34,23 km	7,49 km
2	2020	1,61 km	17,28 km
3	2021	7,67 km	32,55km
4	2022	13,74 km	44,87 km
5	2023	25,3 km	56,08 km

Sumber : Data Bidang Sumber daya Air, 2023

Dari analisa data pencapaian kinerja Indikator Persentase Drainase dalam Kondisi Baik, dapat diketahui bahwa pada Tahun 2023 sudah mencapai 100%.

**Tabel 3.15**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran**  
**Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik**

No	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian
1	2019	1,0	0,88	88 %
2	2020	1,0	0,52	52 %
3	2021	0,32	0,28	87,5%
4	2022	0,32	0,4	125 %
5	2023	0,32	0,55	171%

Sumber : Data Bidang Sumber daya Air, 2023

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa Realisasi Kinerja untuk indikator kinerja sasaran Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik pada Tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Faktor pendukung pencapaian antara lain :

1. Adanya perubahan anggaran Program Pengelolaan dan Pengembangan system drainase yang semula sebesar Rp.193.644.939.729 menjadi Rp.280.540.545.274 sehingga menambah jumlah kegiatan.
2. Adanya UPTD Pematusan yang bertugas membersihkan saluran (normalisasi ) dan pengangkatan sedimen



Gambar 3.1 Tim URC Pematusan

3. Adanya UPTD Alat Berat yang tugas pokoknya membersihkan saluran dengan lebar 1 meter dan akses manuver serta operasional tidak ada halangan utilitas kabel, pipa dan lain-lain.



Gambar 3.2 Tim Alat Berat

4. Adanya TIM URC SDA yang mempunyai tugas :
1. Melakukan pengeringan genangan akibat hujan dengan pompa;
  2. Menindaklanjuti laporan dari warga terkait permasalahan drainase;
  3. Melakukan pengecekan pompa, pintu air dan genset agar berfungsi dengan normal;



Gambar 3.3 Tim URC SDA

4. Telah dilaksanakan setiap bulan Rapat dan Briefing internal Bidang untuk antisipasi, pemantapan dan penyempurnaan terhadap kegiatan yang belum, sedang dan akan dilaksanakan, juga terhadap kinerja pegawai.
5. Bidang Sumber Daya Air DBMSDA memiliki SIDALPRO (Sistem Informasi Pengendalian Proyek) yaitu suatu sistem informasi elektronik yang memudahkan pemantauan pelaksanaan tiap proyek di Bidang Sumber Daya Air sejak awal proses pengadaan sampai dengan serah terima akhir pekerjaan, sehingga pekerjaan dapat terselesaikan lebih efektif dan efisien.
6. Bidang Sumber Daya Air mengeluarkan rekomendasi Peil Banjir untuk pembangunan di Kota Bekasi sebagai upaya pencegahan terjadinya kerusakan Sumber daya Air dan genangan, juga perbaikan fasilitas dan daerah tangkapan air yang ada di daerah pembangunan.



7. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan diantaranya dengan pelayanan Peil Banjir melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, dan penyebaran informasi melalui website, dan sosial media.

Pencapaian indikator Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik pada Tahun 2023 ini didukung oleh indikator capaian Program Pengelolaan Sistem Drainase yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.16**  
**Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik**

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023
1	Persentase Pembangunan drainase jalan	Persen	60,32%	60,59 %	100,45 %
2	Persentase Pemeliharaan drainase	Persen	68,52%	69,54 %	101,48%

*Sumber : Data Bidang Sumber daya Air, 2023*

Dengan melihat indikator program yang tercapai maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik di tahun 2023. Capaian indikator Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik tahun 2023 dikaitkan dengan target akhir Renstra tahun 2023 dengan tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.17**  
**Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik Target Akhir Renstra 2018-2023**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD Tahun 0	2023	Kondisi Kinerja Terakhir Periode RPJMD
Target	Persen	63	0.32	64
Realisasi	Persen		0.55	65,1

*Sumber : Data Olahan Sub-Stansi Perencanaan, 2023*

Jika melihat pada tabel di atas, capaian indikator Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik pada tahun 2023 yang dapat direalisasikan adalah sebesar 0,55 % dan kondisi kinerja terakhir pada priode akhir RPJMD dengan target 64 % tercapai sebesar 65,1 %.

Dari table berikut dilihat bahwa dari 97,37% capaian realisasi anggaran, capaian indikator sasaran Persentase Jembatan dalam kondisi baik yang dihasilkan sebesar 171% sehingga terdapat efisiensi sumber daya (anggaran) sebesar 73,63 %

**Tabel 3.18**  
**Efisiensi Anggaran Berdasarkan Pencapaian Indikator Sasaran**

No	Indikator sasaran/ kebutuhan Anggaran / Efisiensi	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Drainase dalam kondisi baik	0,32	0,55	171
	Anggaran yang Dibutuhkan	280.479.108.274	273.107.169.410	97,37
<b>Nilai Efisiensi</b>				<b>73,63</b>

## 2. Indikator Persentase Polder Dalam Kondisi Baik

Topografi Kota Bekasi adalah area datar rendah. Kota Bekasi dibatasi oleh Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi dan DKI Jakarta sehingga tidak memiliki area hilir sehingga perlunya fasilitas tambahan untuk mencegah terjadinya banjir dengan pembangunan drainase yang baik serta polder - polder pada area rendah rawan banjir. Untuk indikator Persentase Polder dalam kondisi baik merupakan indikator baru setelah dilakukan perubahan RPJMD dan Renstra Dinas BMSDA Tahun 2028-2023.

Rumus Perhitungan :

$$\frac{\text{Capaian indikator kinerja Polder dalam Kondisi Baik}}{\text{Kondisi Ideal indikator kinerja Polder dalam Kondisi Baik}} \times \text{Koefisien Sasaran}$$

Persentase Pembangunan Polder	=	$\frac{3328 \text{ m}^3}{5.148.237,4 \text{ m}^3}$	X	62,61%	=	0,04%
Persentase Pemeliharaan Polder	=	$\frac{0 \text{ m}^3}{3.074.498 \text{ m}^3}$	X	37,39%	=	0 %
<b>Presentase Polder dalam kondisi baik</b>						<b>0,480%</b>

**Tabel 3.19**  
**Analisis Pencapaian Kinerja Indikator Persentase Polder Dalam Kondisi Baik di Dinas BMSDA**

Indikator Kinerja Sasaran	2022		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Polder dalam kondisi baik	2.24	0.04	16,66

Sumber : Data Bidang Sumber daya Air, 2023

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa Realisasi Kinerja untuk indikator kinerja sasaran Persentase Polder Dalam Kondisi Baik pada Tahun 2023 belum tercapai.

Faktor penyebab ketidakcapaian indikator adalah :

1. Indikator tidak tercapai karena anggaran yang diberikan cukup untuk 1 polder dimana kapasitas tampung polder yang dibangun lebih kecil dari target kapasitas tampung.
2. Banyak polder yang terhalang pembebasan lahan

Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Dinas BMSDA terutama indikator yang tidak terpenuhi pada tahun 2023 dapat dilakukan upaya rencana aksi sebagai berikut:

1. Dinas BMSDA mengusulkan pembangunan tampungan air atau polder di wilayah - wilayah yang sering terdampak banjir
2. Menjalin kerjasama penanganan infrastruktur terutama penanganan banjir dengan pemerintah wilayah perbatasan yaitu DKI Jakarta, Bogor, Depok, dan Kabupaten Bekasi maupun pihak swasta.

Capaian indikator Persentase Polder Dalam Kondisi Baik pada Tahun 2023 ini didukung oleh indikator capaian Program Pengelolaan Sumber Daya Air yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.20**  
**Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Persentase Polder Dalam Kondisi Baik**

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023
1	Persentase Pembangunan Polder	Persen	74,29	22,06	29,69
2	Persentase Pemeliharaan Polder	Persen	7,34	1,72	23,4

*Sumber : Data Bidang Sumber daya Air, 2023*

Dengan melihat indikator program yang belum tercapai maka berpengaruh pada capaian indikator sasaran Persentase Polder Dalam Kondisi Baik di tahun 2023. Capaian indikator Persentase Polder Dalam Kondisi Baik tahun 2023 dikaitkan dengan target akhir Renstra tahun 2023 dengan tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.21**  
**Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase Polder Dalam Kondisi Baik Target Akhir Renstra 2018-2023**

	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD Tahun 0	Persentase Polder dalam kondisi baik					Kondisi Kinerja Terakhir Pada Akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
Target	32	NA	NA	1,82	2,24	2,24	42,3
Realisasi				0	0,48	0,04	36,26

Sumber : Data Olahan Sub Substansi Perencanaan DBMSDA, 2023

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa indikator Persentase Polder dalam kondisi baik pada akhir periode RPJMD belum mencapai target.

#### **3.2.4 Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya ketersediaan fasilitas penunjang infrastruktur (Pedestrian, taman, penerangan jalan umum, dan reklame)**

##### **1. Indikator Persentase Pedestrian Dalam Kondisi Baik**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, perencanaan teknis jalan wajib memperhitungkan kebutuhan fasilitas pejalan kaki dan penyandang difable, hal ini karena pejalan kaki dan penyandang difable merupakan bagian dari lalu lintas. Fasilitas pejalan kaki dan penyandang difable merupakan prasarana moda transportasi yang penting, antara lain dapat berupa trotoar dan penyebrangan jalan di atas jalan, pada permukaan jalan dan/atau di bawah jalan.

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi ditunjuk sebagai dinas yang menyelenggarakan Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang Jalan, dan hal ini tertuang pada Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi. Pemanfaat Ruang Jalan yang dimaksud salah satunya adalah penataan dan pengembangan pedestrian.

Pedestrian adalah pergerakan atau sirkulasi atau perpindahan orang atau manusia dari satu tempat di titik asal (origin) ke tempat lain sebagai tujuan (destination) dengan berjalan kaki (Rubenstein,1992).

Untuk itu, diperlukan perencanaan yang baik agar Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang Jalan dapat terlaksana dengan baik. Berikut adalah tabel Capaian

Kinerja Indikator Persentase Pedestrian yang Ramah Bagi Pejalan Kaki, Penyandang Difable dan Lansia.

Rumus Perhitungan :

$$\frac{\text{Capaian indikator kinerja Pedestrian dalam Kondisi Baik}}{\text{Kondisi Ideal indikator kinerja Pedestrian dalam Kondisi Baik}} \times \text{Koefisien Sasaran}$$

Persentase Pembangunan Pedestrian yang ramah bagi pejalan kaki, penyandang difabel dan lansia	=	0 km	X	84,39%	=	0 %
		252,08 km				
Persentase Pemeliharaan Pedestrian	=	0,585 km	X	15,61%	=	0,196 %
		46,63 km				
<b>Presentase Pedestrian dalam kondisi baik</b>						<b>0,196 %</b>

**Tabel 3.22**  
**Capaian Kinerja Indikator Persentase Pedestrian Dalam Kondisi Baik**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pedestrian dalam kondisi baik	1.67	0.196	11,73

Sumber : Bidang Bina Marga (2023)

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian tahun 2023 yaitu sebesar 0,585 km, dengan persentase capaian 0,039 % dari target yang di tentukan. Dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Bidang Bina Marga tahun 2023 belum memenuhi target capaian kinerja yang direncanakan.

Capaian indikator Persentase Pedestrian Dalam Kondisi Baik pada Tahun 2023 ini didukung oleh indikator capaian Program Penyelengaran Jalan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.23**  
**Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Persentase Polder Dalam Kondisi Baik**

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023
1	Persentase Pembangunan Pedestrian yang ramah bagi pejalan kaki,	Persen	20,48	19,85	96.92

	penyanggandifabel dan lansia				
2	Persentase Pemeliharaan Pedestrian	Persen	89,89	75,64	84,14

Sumber : Data Bidang Sumber daya Air, 2023

Dari analisa data pencapaian kinerja Indikator Persentase Pedestrian Dalam Kondisi Baik diketahui bahwa pada Tahun 2023 belum mencapai target.

**Tabel 3.24**  
**Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik Target Akhir Renstra 2018-2023**

	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD Tahun 0	Persentase Polder					Kondisi Kinerja Terakhir Pada Akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
Target	46,7	NA	NA	1,34	1,67	1,67	54,1
Realisasi				1,66	0,393	0,196	51,7

Sumber : Data Olahan Sub Substansi Perencanaan DBMSDA, 2023

Jika melihat pada tabel di atas, capaian indikator Persentase Polder Dalam Kondisi Baik pada tahun 2023 yang dapat direalisasikan adalah sebesar 0,196 % dan kondisi kinerja terakhir pada priode akhir RPJMD dengan target 54,1 % belum tercapai.

## 2. Indikator Persentase PJU dalam Kondisi Baik

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagai Perangkat Daerah yang dilimpahkan sebagian wewenang oleh Wali Kota Bekasi melalui PeraturanWali Kota Nomor 122 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi. Hal tersebut menyebabkan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air menjadi penanggung jawab pada bidang urusan kebinamargaan terhadap Indikator Persentase PJU dalam kondisi baik

Rumus Perhitungan :

$$\frac{\text{Capaian indikator kinerja PJU dalam Kondisi Baik}}{\text{Kondisi Ideal indikator kinerja PJU dalam Kondisi Baik}} \times \text{Koefisien Sasaran}$$

Persentase Pembangunan PJU Baru	=	1611 titik	X	96,20%	=	1,38%
		112,550 titik				
Jumlah Pemeliharaan PJU	=	8150 titik	X	3,80%	=	0,55%
		56.255 titik				
<b>Persentase PJU dalam kondisi baik</b>						<b>1,93%</b>

Adapun capaian kinerja Indikator Persentase PJU dalam kondisi baik dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.25**  
**Analisis Pencapaian Kinerja Indikator Persentase PJU Dalam Kondisi Baik di Dinas BMSDA**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian
<b>Persentase PJU dalam kondisi baik</b>	1,61 %	1,93 %	119,8 %

*Sumber : Data Bidang Sarana Pengembangan Penerangan Jalan Umum dan Taman, 2023*

Dengan melihat tabel diatas bahwa target tahun 2023 sebesar 1,61 persen, sementara realisasi mencapai 1,93 persen maka capaian kinerja tahun 2023 atas indikator Persentase PJU Dalam Kondisi Baik sebesar 119,8 persen, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 terlampaui. Untuk melihat perbandingan capaian Jalan dalam kondisi baik Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.26**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2018-2023 untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase PJU Dalam Kondisi Baik**

Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Pada tahun (%)					Realisasi Kinerja Pada tahun (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase utilitas dalam kondisi baik										
1. PJU Baru	1,5	1,5				0,91	0,42			
2. PJU dipelihara	20	20				47,57	57,79			
Persentase PJU dalam kondisi baik	-	-	1,61	1,61	1,61			1,93	2,41	1,93

*Sumber : Data Bidang Prasarana Jalan, 2023*

Jika melihat pada tabel di atas, capaian indikator Persentase PJU Dalam Kondisi Baik pada tahun 2023 yang dapat direalisasikan adalah sebesar 1,93 % dibandingkan dengan target Renstra pada tahun 2023 sebesar 1,61 %. Maka, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi sudah mencapai

**Tabel 3.27**  
**Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase PJU Dalam Kondisi Baik Target Akhir Renstra 2018-2023**

	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD Tahun 0	Persentase PJU dalam kondisi baik					Kondisi Kinerja Terakhir Pada Akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
Target	65 %	2,37	1,19	1,61	1,61	1,61	73,39 %
Realisasi		2,37	1,19	1,93	2,41	1,93	74,83 %

Sumber : Data Olahan Sub Substansi Perencanaan DBMSDA, 2023

Tabel diatas menunjukkan kondisi kinerja terakhir pada periode RPJMD 2018-2023 untuk indikator Persentase PJU dalam Kondisi baik mencapai target., Dimana kondisi awal periode RPJMD sebesar 65 % dan kondisi akhir sebesar 74,83 dari target 73,39 %.

Berikut adalah factor yang mendukung pencapaian indikator Persentase PJU dalam kondisi baik yaitu :

1. Komitmen Kepala daerah untuk meningkatkan
2. Adanya program dan kegiatan yang relevan untuk mengukit pencapaian sasaran strategis
3. Etos kerja aparatur Dinas BMSDA yang semakin meningkat
4. Adanya Tim URC PJU yang mempunyai tugas penanganan pengaduan permasalahan pada lampu Penerangan jalan umum\



Gambar 3.4 Tim URC PJU



Dari table berikut dilihat bahwa dari 90,5 % capaian realisasi anggaran, capaian indikator sasaran Persentase PJU dalam kondisi baik yang dihasilkan sebesar 119,8 % sehingga terdapat efisiensi sumber daya (anggaran) sebesar 29,3 %

**Tabel 3.28**  
**Efisiensi Anggaran Berdasrkan Pencapaian Indikator sasaran**

No	Indikator sasaran/ kebutuhan Anggaran / Efisiensi	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase PJU dalam kondisi baik	1,61	1,93	119,8
	Anggaran yang Dibutuhkan	108.614.816.870	98.292.229.509	90,5
<b>Nilai Efisiensi</b>				<b>29,3</b>

Program yang menunjang dalam pencapaian indikator Persentase PJU dalam kondisi baik adalah program pengembangan permukiman. Adapun capaian kinerja indikator program sebagai berikut :

**Tabel 3.29**  
**Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Persentase PJU Dalam Kondisi Baik**

No	Program/ Kegiatan	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023
1	Program Pengembangan Permukiman	Persentase peningkatan pembangunan PJU Baru	%	54,18	56,37	104,04
		Presentase Pemeliharaan PJU	titik	11.250	8.150	72,4

Sumber : Data Bidang Prasarana Jalan, 2023

### 1. Indikator Persentase Reklame Dalam kondisi Baik

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagai Perangkat Daerah yang dilimpahkan sebagian wewenang oleh Wali Kota Bekasi melalui Peraturan Wali Kota Nomor 122 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi. Hal tersebut menyebabkan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air menjadi penanggung jawab pada bidang urusan kebinamargaan terhadap Indikator Persentase Reklame dalam kondisi baik.

Adapun capaian kinerja Indikator Persentase Reklame dalam kondisi baik dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.30**  
**Analisis Pencapaian Kinerja Indikator Persentase Reklame Dalam Kondisi Baik di Dinas BMSDA**

Indikator Kinerja Sasaran	2023		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Reklame dalam kondisi baik	25 %	25 %	100 %

*Sumber : Data Bidang Bina Marga, 2022*

Dengan melihat tabel diatas target tahun 2023 sebesar 25 persen dan realisasi mencapai 25 persen maka capaian kinerja tahun 2023 atas indikator Persentase Reklame Dalam Kondisi Baik sebesar 100 persen. Untuk melihat perbandingan capaian reklame dalam kondisi baik Tahun 2018- 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.31**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2018-2023 untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase PJU Dalam Kondisi Baik**

Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Pada tahun (%)					Realisasi Kinerja Pada tahun (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Reklame dalam kondisi baik	25	25	25	25	25	25	12,5	3,13	25	25

*Sumber : Data Bidang Bina Marga, 2023*

Jika melihat pada tabel di atas, capaian indikator Persentase Reklame Dalam Kondisi Baik pada tahun 2023 yang dapat direalisasikan adalah sebesar 25 % dibandingkan dengan target Renstra pada tahun 2023 sebesar 25 %. Maka, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi sudah mencapai

**Tabel 3.32**  
**Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase**  
**Reklame Dalam Kondisi Baik Target Akhir Renstra 2018-2023**

	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD Tahun 0	Persentase Reklame dalam kondisi baik					Kondisi Kinerja Terakhir Pada Akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
Target	50 %	25	25	25	25	25	50 %
Realisasi		25	25	25	25	25	50 %

Tabel diatas menunjukkan kondisi kinerja terakhir pada periode RPJMD 2018-2023 untuk indikator Persentase Reklame dalam Kondisi baik mencapai target., Dimana kondisi awal periode RPJMD sebesar 50 % dan kondisi akhir sebesar 50 %.

Berikut adalah factor yang mendukung pencapaian indikator Persentase PJU dalam kondisi baik yaitu :

1. Komitmen Kepala daerah untuk meningkatkan
2. Adanya program dan kegiatan yang relevan untuk mengukit pencapaian sasaran strategis
3. Etos kerja aparatur Dinas BMSDA yang semakin meningkat
4. Adannya Tim URC Trisula yang mempunyai tugas melaksanakan penertiban dan pembongkaran reklame, dan melaksanakan pengawasan, pengendalian dalam rangka pendataan dan penertiban jaringan utilitas dan objek reklame yang berada di titik sarana dan prasarana kota pada setiap ruas jalan per wilayah Kecamatan di Kota Bekasi.



Gambar. 3.5 Tim URC Trisula

Dari tabel berikut dilihat bahwa dari 95,15 % capaian realisasi anggaran, capaian indikator sasaran Persentase Reklame dalam kondisi baik yang dihasilkan sebesar 100 % sehingga terdapat efisiensi sumber daya (anggaran) sebesar 4,85 %

**Tabel 3.33**  
**Efisiensi Anggaran Berdasrkan Pencapaian Indikator sasaran**

No	Indikator sasaran/ kebutuhan Anggaran / Efisiensi	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Reklame dalam kondisi baik	25	25	100
	Anggaran yang Dibutuhkan	2.256.476.000	2.147.023.957	95,15
<b>Nilai Efisiensi</b>				<b>4,85</b>

Program yang menunjang dalam pencapaian indikator Persentase Reklame dalam kondisi baik adalah program pengembangan permukiman. Adapun capaian kinerja indikator program sebagai berikut :

**Tabel 3.34**  
**Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Persentase Reklame Dalam Kondisi Baik**

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023
1	Persentase Reklame Dalam Kondisi baik	Persen	25	25	100

Sumber : Data Bidang Bina Marga, 2023

Dengan melihat indikator program tercapai, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Persentase Reklame dalam kondisi baik. Capaian indikator Persentase Reklame dalam kondisi baik jika dikaitkan dengan target akhir tahun Renstra pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.35**  
**Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase**  
**Reklame Dalam Kondisi Baik Target Akhir Renstra 2018-2023**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase PJU Dalam Kondisi Baik	
		2022	2023
Target	Persen	25	50
Realisasi	Persen	25	

Sumber : Data Olahan Sub Koordinator Perencanaan dan Pelaporan DBMSDA, 2022

Jika melihat pada tabel di atas, capaian indikator Persentase Reklame Dalam Kondisi Baik pada tahun 2022 yang dapat direalisasikan adalah sebesar 25 % dibandingkan dengan target Renstra pada tahun 2023 sebesar 50 %. Maka, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi belum mencapai target.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase Reklame dalam kondisi baik dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.36**  
**Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi penggunaan Sumber**  
**Daya untuk Indikator Kinerja Utama Persentase Reklame dalam kondisi baik**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI (Rp)100		
			NOMINAL	KEU %	FISIK %
1	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	2.256.476.000	2.147.023.957	95,15	<b>100</b>
1	<b>Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>	2.256.476.000	2.147.023.957	95,15	100
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang	2.256.476.000	2.147.023.957	95,15	100

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 ( satu) program dan 1 (satu) kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase Reklame dalam kondisi baik, dimana pagu anggaran sebesar Rp. 2.256.476.000 - ( dua milyar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 2.147.023.957,- ( dua milyar seratus empat puluh tujuh juta dua puluh tiga ribu Sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Persentase reklame dalam kondisi baik mencapai 95,15%,.

### 3.2.5 Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya infrastruktur ruang terbuka hijau yang berkualitas

#### 1. Indikator Persentase Taman dalam kondisi baik

Pembangunan suatu wilayah perkotaan perlu memperhatikan daya dukung lingkungan. Salah satu cara untuk dapat mencapai pembangunan perkotaan yang berkelanjutan adalah dengan menerapkan salah satu atribut green city yaitu ruang terbuka hijau (RTH).

Berdasarkan letak geografis dan fungsi Kota Bekasi yang berada di jalur silang yang menghubungkan Ibu kota Negara dengan beberapa daerah penyangga strategis lainnya, sehingga diperlukan daya dukung jalan yang memadai, hal ini sesuai dengan data volume lalu lintas yang meningkat dari tahun ke tahun.

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagai Perangkat Daerah yang dilimpahkan sebagian wewenang oleh Wali Kota Bekasi melalui Peraturan Wali Kota Nomor 122 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi. Hal tersebut menyebabkan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air menjadi penanggung jawab pada bidang urusan kebinamargaan.

Capaian indikator kinerja Pedestrian dalam Kondisi Baik

X Koefisien Sasaran

Kondisi Ideal indikator kinerja Taman dalam Kondisi Baik

Persentase Pembangunan Taman Baru	=	13,102 m3	X	88,22%	=	1,5%
		764.980 m3				
Persentase Pemeliharaan Taman	=	106.154 m3	X	11,78%	=	12,24%
		102.157 m3				
<b>Persentase Taman dalam kondisi baik</b>						<b>13,75 %</b>

Adapun capaian kinerja indikator Persentase Taman dalam kondisi baik dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.37**  
**Analisis Pencapaian Kinerja Indikator Persentase Taman Dalam Kondisi Baik di Dinas BMSDA**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian
<b>Persentase Taman dalam kondisi baik</b>	11,78	13,75	116,72

Sumber : Data Bidang Parsarana Jalan, 2023

Dengan melihat tabel diatas bahwa realisasi Indikator Taman dalam Kondisi Baik mencapai 13,75 persen, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada

tahun 2023 telah terlampaui. Untuk melihat perbandingan capaian Indikator Persentase Taman Dalam Kondisi Baik Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.38**  
**Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase Taman Dalam Kondisi Baik Target Akhir Renstra 2018-2023**

	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD Tahun 0	Persentase Polder					Kondisi Kinerja Terakhir Pada Akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
Target	30	NA	NA	8,34	9,96	11,78	74,7
Realisasi				13,53	15,25	13,75	85,18

*Sumber : Data Olahan Sub Substansi Perencanaan DBMSDA, 2023*

Tabel diatas menunjukkan kondisi kinerja terakhir pada periode RPJMD 2018-2023 untuk indikator Persentase Taman dalam Kondisi baik mencapai target., Dimana kondisi awal periode RPJMD sebesar 30 % dan kondisi akhir sebesar 85,18 dari target 74,7 %.

Berikut adalah factor yang mendukung pencapaian indikator Persentase PJU dalam kondisi baik yaitu :

1. Komitmen Kepala daerah untuk Penambahan dan pemeliharaan taman-taman kota bernuansa tema tertentu
2. Adanya program dan kegiatan yang relevan untuk mengukit pencapaian sasaran strategis
3. Etos kerja aparatur Dinas BMSDA yang semakin meningkat
4. Adannya Tim URC Taman yang mempunyai tugas melakukan pemeliharaan pohon-pohon di jalur jalan protokol maupun area publik untuk meminimalisir dampak terjadinya pohon tumbang

Program yang menunjang dalam pencapaian indikator Persentase Taman dalam kondisi baik adalah Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI). Adapun capaian kinerja indikator program sebagai berikut :

**Tabel 3.39**  
**Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik**

No	Program/ Kegiatan	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023
1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI).	Persentase Pembangunan Taman Baru	%	19,60	20,53	104,7
		Persentase Pemeliharaan Taman	%	94,13	97,16	103,22

Sumber : Data Bidang Prasarana Jalan, 2023

Dari tabel berikut dilihat bahwa dari 86,05 % capaian realisasi anggaran, capaian indikator sasaran Persentase Taman dalam kondisi baik yang dihasilkan sebesar 116,72% sehingga terdapat efisiensi sumber daya (anggaran) sebesar 30,67 %

**Tabel 3.40**  
**Efisiensi Anggaran Berdasarkan Pencapaian Indikator sasaran**

No	Indikator sasaran/ kebutuhan Anggaran / Efisiensi	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase taman dalam kondisi baik	11,78	13,75	116,72
	Anggaran yang Dibutuhkan	26.514.399.880	22.815.253.503	86,05
<b>Nilai Efisiensi</b>				<b>30,67</b>

### 3.3 ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air berkaitan dengan anggaran belanja.

Jumlah anggaran belanja pada Dinas BMSDA pada tahun 2023 dapat dilihat pada table di bawah ini :



Tabel 3.41 Tabel Anggaran Belanja pada Dinas BMSDA

NO	NAMA PROGRAM	APBD MURNI			APBD PERUBAHAN		
		JML KEG	JML SUB KEG	PAGU (Rp)	JML KEG	JML SUB KEG	PAGU (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6	17	34.298.479.380	6	17	35.864.296.115
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1	5	12.520.500.000	1	5	26.656.280.000
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1	5	193.644.939.729	1	5	280.479.108.274
4	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1	2	90.640.854.480	1	2	108.614.816.870
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1	12	207.226.975.491	1	12	344.477.875.452
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1	1	2.256.476.000	1	1	2.256.476.000
7	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1	3	21.013.099.000	1	3	26.514.399.880
<b>JUMLAH</b>		12	45	561.601.324.080	12	45	824.863.252.591

Sumber Data : E-Monev 2023

Akuntabilitas keuangan pada Dinas BMSDA Kota Bekasi didasarkan pada penyerapan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2023. Adapun rincian realisasi Program dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Tabel. 3.42**  
**Realisasi Anggaran DBMSDA Tahun 2023**

<b>Program/ Kegiatan</b>	<b>PAGU</b>	<b>Realisasi (Rp.)</b>	<b>% Keu</b>
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	35.864.296.115	31.691.900.605	88,37
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	26.656.280.000	25.158.072.335	94,38
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	280.479.108.274	273.107.169.410	97,37
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>	108.614.816.870	98.292.229.509	90,5
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	344.477.875.452	328.789.296.448	95,45
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	2.256.476.000	2.147.023.957	95,15
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	26.514.399.880	22.815.253.503	86,05

Sumber : E-monev Tahun 2023

### 3.4 ANALISIS ANGGARAN BERDASARKAN SASARAN SRATEGIS

Analisis anggaran berdasarkan sasaran strategis yang ditetapkan oleh dinas BMSDA dapat dilihat pada table dibawah ini:

Table 3.43 Analisis Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Sasaran	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran dan pelaksanaannya	35.864.296.115	31.691.900.605	88,37
2	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan yang layak untuk menunjang masyarakat	344.477.875.452	328.789.296.448	95,45
3	Meningkatnya ketersediaan saluran dan bangunan air yang layak untuk menunjang masyarakat	307.135.388.274	298.265.241.745	97,11
4	Meningkatnya ketersediaan fasilitas penunjang infrastruktur (Pedestrian, penerangan jalan umum, dan reklame)	110.871.292.870	100.439.253.466	90,59
5	Meningkatnya Infrastruktur Ruang Terbuka Hijau Yang Berkualitas	26.514.399.880	22.815.253.503	86,05

Sumber Data : Aplikasi Simda Tahun 2023

### 3.5 PRESTASI ORGANISASI

Selama kurun waktu 5 tahun Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sudah mendapatkan prestasi yang dapat dilihat pada table dibawah ini :

Table 3.44 Penghargaan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

No	Penghargaan	Tanggal	Dokumentasi
1	Piagam penghargaan diberikan kepada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagai Juara 3 <b>Kategori Perangkat Daerah Terinovatif</b> dala Acara : <b>Kota Bekasi Innovation Week 2020</b> , yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi.	2020	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Penyelenggaraan pemerintah yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-Prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi atas penyelenggaraan program kegiatan pada Tahun 2018-2023 yang sekaligus menjadi masukan dan bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Tahun 2023 merupakan tahun ke-lima dari rencana Strategis Perubahan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun 2018-2023. Keberhasilan yang telah dicapai merupakan Kerjasama dan partisipasi dari semua pihak dan harus dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan, sedangkan target yang belum tercapai harus dapat diantisipasi kendala -kendala yang ada untuk dapat dicari solusinya sehingga untuk tahun mendatang capaian realisasi dapat sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Meskipun target kinerja tahun 2023 hampir semua tercapai, tetapi ada beberapa evaluasi yang harus ditindaklanjuti agar kinerja tahun 2023 menjadi lebih baik lagi. Beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan tahun 2023 adalah :

1. Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan
2. Pembangunan Polder Sebagai mitigasi menangani banjir akibat kondisi topografi Kota Bekasi
3. Melaksanakan penanganan banjir dan penyelenggaran drainase kota dengan upaya – upaya yang dituangkan dalam bentuk kegiatan rutin tahunan
4. Meningkatkan lampu PJU dengan lampu LED
5. Meningkatkan kualitas seluruh dokumen Perencanaan

6. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur yang kompeten dengan mengikuti bimbingan teknis, workshop, sosialisasi maupun pelatihan-pelatihan di bidangnya masing-masing.
7. Menjalinkan Kerjasama dengan instansi lain (stakeholder) dalam pelaksanaan program-program dan melakukan Upaya-upaya progresif dalam rangka pencapaian indikator sasaran yang telah dilakukan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun 2023, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan dan meningkatkan capaian kinerja dimasa yang akan datang dan diharapkan dapat memberikan penjelasan dan gambaran kepada semua pihak tentang pertanggungjawaban kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bekasi, Januari 2024

**KEPALA DINAS BINA MARGA DAN  
SUMBER DAYA AIR  
KOTA BEKASI**



**MUHAMMAD SOLIKHIN, S.SiT, MM**  
Pembina TK.I  
NIP. 19750910 199803 1 006